



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	1&2

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sembilan Kali Berturut-turut Pemprov Sumbar Pertahankan Opini WTP



PADANG, METRO
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumbar Tahun Anggaran (TA) 2020, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ini merupakan yang ke sembilan kali berturut-turut diraih sejak tahun 2012. LHP atas LKPD itu diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Sumbar, Jumat (7/5) saat rapat paripurna di Ruang Sidang

ni Minggu. Berdasarkan zonasi kabupaten/kota, habitat daerah yang baru Kota Solok, Kota n, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pangasinan. Bupati/ Walikota silakan menyesuaikan kondisi di daerah. kata juru bicara 'anangan Covid-19, Jasman Rizal. di diperbolehkan di dan lapangan, di- Jasman, shalat led ni hanya dapat di kan dengan mem kan protokol kese- secara ketat pada aman. Shalat dila- dengan berpedo- ada Surat Edaran i Agama Republik sia Nomor SE 07 2021 tentang Pan- Penyelenggaraan dul Fitri Tahun 1442 2021 Masehi di Saat ii Covid-19. bijakan ini diambil ov Sumbar untuk n angka penuluran 19. Dalam beberapa terakhir, kasus Co- di provinsi ini me- drastis. Jika tidak vensi, kondisi ini neningkatkan beban sakit yang berko- longan angka kesaa- an angka kematian," is Jasman. (rgr)

mau tak mau, semua h dan pelayanan lainnya akan ditutup. tidak kita inginkan," ndri Septa. indaklanjuti kepu- Wali Kota Padang it, Kapolresta Pam- ran Amir menga- pihaknya siap meng- keputusan bersa- dan membantu Pem- ang mensosialisasi- pada masyarakat. ta akan terus me- tkan agar masya- nematuhi agar tidak saakan sholat Idul masjid ataupun di an," tegasnya. (tin)

Pemprov dari hal 1

Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menga- takan, peringkat opini WTP ini merupakan yang ke sembilan kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Sumbar. "Patut kita bersyukur, karena hari ini kita kembali peroleh WTP ke sembilan kali berturut-turut dari BPK ini, berkat kerja keras dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyeleng- garaan pemerintahan," ujar Mahyeldi Ansharullah. Dikatakannya, prestasi kali ini didapat berkat kom- itmen bersama dalam upaya perbaikan yang dilak- ukan terhadap laporan keuangan serta melak- sanakan tindaklanjut atas temuan. Mahyeldi Ansharullah berharap, ketaatan Pem- prov Sumbar pada penga- turan keuangan akan lebih meningkat lagi ke depan- nya. Ia mengungkapkan, akan segera menindak- lanjuti sejumlah catatan dari BPK yang akan di- kerjakan enam bulan ke depan. Ke depannya harus ada perbaikan agar jangan sampai ada kesalahan. Sementara itu, Ketua DPRD Supardi mengata- kan, meraih WTP bukan berarti sudah sempurna semuanya. Masih ada beberapa temuan yang mesti ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan OPD terkait. "Mudah-mudahan dari hasil LHP BPK bisa ditindak- lanjuti dalam waktu 60 hari ke depan, apa yang dire- komendasikan BPK bisa diwujudkan," katanya. Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Sumbar TA 2020 berdasarkan kesepa- katan seluruh pihak dilak- sanakan dalam Rapat Pari- purna di Gedung DPRD Pro- vinsi Sumbar, dengan me-

ngikuti protokol kesehatan Covid-19 dan melalui daring via video conference. Turut hadir secara dar- ing Anggota V BPK/Pim- pinan Pemeriksaan Keua- ngan Negara V Bahrullah Akbar, dan Auditor Keua- ngan Negara V Akhsanul Khaq, Sementara itu, hadir langsung menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sumbar TA 2020 Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Yusnadewi ke- pada Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi dan Gu- bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di DPRD Pro- vinsi Sumbar. Juga ikut menyaksikan Wakil Gu- bernur, Audy Joinaldy. Berdasarkan pemerik- saan yang telah dilakukan BPK RI atas LKPD Provinsi Sumbar TA 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksa- nakan oleh Pemprov Sum- bar, maka BPK memberi- kan opini WTP. Anggota V BPK RI, Bah- rullah Akbar BPK menga- takan, Pemprov Sumbar telah berhasil mempertah- ankan opini WTP selama sembilan kali berturut- turut. Hal tersebut menun- jukkan komitmen dan upa- ya nyata DPRD dan ma- najemen Pemprov Sumbar untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan ke- uangan. Dengan menjalan- kan dan menerapkan prak- tik-praktik pengelolaan ke- uangan yang baik. Meski demikian, Bah- rullah Akbar menjelaskan pihaknya masih menemu- kan beberapa permasa- lahan terkait pengelolaan keuangan daerah. "Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Sumbar, BPK ma- sih menemukan beberapa permasalahan terkait pe- ngelolaan keuangan dae- rah. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut, tidak material

dalam mempengaruhi ke- wajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Bahrullah Akbar. Bahrullah Akbar men- jelaskan, dalam upaya me- ningkatkan peran BPK RI atas pengelolaan dan tang- gung jawab keuangan ne- gara, pihaknya terus beru- paya agar laporan hasil pemeriksaan yang disam- paikan, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan. "Berdasarkan hal ter- sebut dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun ini, ada yang berbeda de- ngan tahun sebelumnya, BPK secara bersamaan juga melakukan pemerik- saan kinerja atas program pembangunan infrastruk- tur gedung dan bangunan, yang menjadi salah satu program prioritas pem- bangunan daerah di tahun 2020," paparnya. "Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan, dalam rangka mendukung tersedianya sarana dan prasarana bagi aparaturnya dan masyarakat pada Pemprov Sumbar," tambah Bahrullah Akbar. Dalam kesempatan ter- sebut, Bahrullah Akbar juga menyampaikan Ikhtisar Ha- sil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020. IHPD ini memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota, yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar pada tahun 2020. "Perlu kami sampaikan, sebelum LHP ini disera- kan, kami telah meminta tanggapan dari Pemerin- tah Provinsi Sumatera Barat atas konsep rekomen- dasi BPK. Termasuk ren- cana aksi rekomendasi menindaklanjuti rekomen- dasi BPK. Sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel," ucap Bah- rullah Akbar. (fan/adv)